

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemberdayaan**

##### **A.1 Pengertian Pemberdayaan**

Banyak ahli telah memberikan definisi pemberdayaan. Kata dasar "daya" berasal dari akar kata dan ditambahkan dengan awalan "ber", yang berarti "mampu". Karena kekuasaan sama dengan kekuatan, kekuasaan dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat sesuatu menjadi bebas atau memiliki daya atau kekuatan. Akibat peran besar manusia dalam pembangunan, masalah kekuasaan dalam pembangunan sering terdengar. Sangat penting bagi seluruh bangsa, pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri untuk memprioritaskan pemberdayaan masyarakat karena peran manusia sangat penting dalam pembangunan. Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi mereka kebebasan untuk bertanggung jawab atas pikiran, keputusan dan tindakan mereka adalah pemberdayaan. (Wasistiono, 2005: 80)

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas suatu komunitas dengan mendorong, mendorong dan menyadarkan orang lain tentang potensi mereka. Kartasasmitha (1996) mengatakan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kekuatan tersebut dengan mendorong, memotivasi, dan menyadarkan masyarakat akan potensi mereka dan

berusaha untuk mengembangkannya (Zubaedi, 2007: 126). Selain itu, Adi menyatakan bahwa pemberdayaan juga dikenal sebagai *empowerment* pada dasarnya ditujukan untuk memberikan daya kepada yang belum berdaya. (Rukminto, 2007: 113)

Menurut ahli lain pemberdayaan pada intinya "Membantu klien mendapatkan kekuatan untuk mengambil keputusan dan menentukan hal-hal yang mempengaruhinya, termasuk mengurangi dampak hambatan pribadi dan sosial untuk bertindak. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan yang tersedia, termasuk transfer kekuatan dari lingkungan,".

Dengan demikian, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya seseorang atau kelompok untuk memperoleh kemandirian dan keberdayaan pada masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan potensi.

## **A.2 Bentuk-bentuk Pemberdayaan**

Empat prinsip yang dianut dalam proses pemberdayaan menurut Wasistiono (2005 : 84):

- 1) Prinsip Kebersahajaan

Yaitu dilakukan secara efisien dan logis dan dicapai melalui perencanaan yang baik

- 2) Sistematis

Dimaksudkan untuk dilakukan secara profesional, terorganisir, diukur sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dan dapat disesuaikan dengan berbagai kearifan.

3) Holistik

Yaitu mengikuti prinsip umum, prinsip ini mengikutsertakan banyak orang yang terlibat dalam proses pemberdayaan.

4) *Regenerative*

Yaitu mengikuti prinsip kesinambungan terus menerus atau berlanjut sampai terciptanya kemandirian masyarakat miskin, terutama dibidang ekonomi.

Semua pihak yang terlibat harus menjadi sangat serius dalam menerapkan keempat prinsip di atas, terutama dalam menemukan model atau bentuk pemberdayaan menuju kemandirian masyarakat. Untuk menemukan model atau bentuk pemberdayaan, akan bermanfaat untuk memberikan beberapa pandangan dari para ahli yang terkait dengan masalah ini. Dalam Suharto (2003), Rothman menjelaskan beberapa jenis pemberdayaan masyarakat, seperti berikut::

1) Pengembangan lokal

Sebagai model untuk memecahkan masalah ketidakberdayaan masyarakat, bentuk ini menekankan pada proses mobilisasi berbagai kapasitas masyarakat. Pekerja dan komponen masyarakat lainnya

diposisikan sebagai pembangkit semangat untuk memanfaatkan potensi yang masih terpendam.

## 2) Bentuk Perencanaan Sosial (Social Planning Model)

Dengan bentuk ini, masyarakat dilayani dengan baik. Mereka menjadi pihak yang dilayani karena mereka tidak dapat menangani masalah hidup mereka. Namun demikian, setiap pekerja sosial dianggap sebagai dinamisor dalam pekerjaan mereka. Para penggerak ini memiliki pengalaman dalam membuat program pemberdayaan untuk kelompok sasaran seperti orang miskin renta dan penyandang cacat.

## 3) Bentuk *Social Action*

Menurut model bentuk tindakan sosial, proses pemberdayaan masyarakat tidak efektif karena setiap masyarakat selalu memiliki berbagai potensi yang belum digunakan. Model ini berasumsi bahwa ada keterlibatan struktural dalam proses kemiskinan masyarakat. Artinya, masyarakat itu sengaja dimiskinkan agar tidak berdaya. Kebijakan-kebijakan yang dicetuskan sering tidak bersifat populis, atau tidak berpihak kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan adanya aksi nyata baik dari *stakeholder* maupun masyarakat itu sendiri untuk bergerak mewujudkan pemberdayaan ekonomi yang dicita-citakan

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan meliputi pengembangan lokal, perencanaan sosial dan *social action*. Dan proses

pemberdayaan mempunyai prinsip kebersahajaan, sistematis, holistic dan regenerative. Bentuk-bentuk dan prinsip pemberdayaan diperlukan keseriusan dalam menemukan bentuk pemberdayaan menuju kemandirian masyarakat.

### **A.3 Tujuan Pemberdayaan**

Rukminto (2007 : 119), merumuskan enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1) Perbaiki Kelembagaan, “*Better Institution*”

Dengan meningkatkan kegiatan dan tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan, yang mencakup membangun hubungan bisnis. Organisasi yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di dalamnya untuk membantu lembaga tersebut mencapai tujuannya. Oleh karena itu, tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Mudah untuk mencapai tujuan yang telah disetujui oleh semua anggota organisasi.

Organisasi yang baik memiliki program kerja yang jelas, terarah dan dapat diukur, serta visi, misi dan tujuan. Semua orang yang terlibat dalam kegiatan merasa memiliki kekuatan dan memiliki peran untuk membantu kemajuan organisasi. Para anggota dapat saling mendorong untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dari waktu

ke waktu dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mereka.

2) Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan diperbaiki, diharapkan bisnisnya juga akan lebih baik. Kegiatan dan perbaikan kelembagaan juga diharapkan akan meningkatkan bisnis yang dilakukan, yang akan lebih membantu masyarakat lokal. Diharapkan juga bahwa hal ini akan membantu lembaga tersebut berkembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua anggota.

3) Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan organisasi secara keseluruhan, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Saat ini, manusia banyak merusak lingkungan karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jika manusia memiliki kualitas manusia yang tinggi, seperti pendidikan dan kecerdasan, maka mereka tidak akan merusak lingkungan.

Jika ada kemiskinan, orang mungkin melakukan tindakan yang merusak lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena terdesak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Oleh karena itu,

karena kemiskinan atau pendapatan yang terbatas seringkali merupakan penyebab kerusakan lingkungan, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan "fisik dan sosial".

5) Perbaikan Kehidupan "*Better Living*"

Berbagai faktor, termasuk peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, diharapkan memiliki korelasi dengan peningkatan lingkungan. Pada akhirnya, peningkatan pendapatan dan lingkungan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) Perbaikan Masyarakat "*Better Community*"

Jika setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan "fisik dan sosial" yang lebih baik, yang diharapkan akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2015) yaitu perbaikan kelembagaan dengan perbaikan tindakan yang dilakukan, setelah itu diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan usaha, dan berimplikasi kepada perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik.

#### A.4 Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan dalam tujuh tahap. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan Soekanto (1998 : 96) yaitu :

1) Tahap Persiapan

Untuk program atau kegiatan pemberdayaan berhasil, dua tahap harus diselesaikan. Pertama, persiapan tenaga pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh karyawan masyarakat; kedua, persiapan lapangan, yang biasanya dilakukan secara nondirektif.

2) Tahap Pengkajian "*Assessment*"

Proses pengkajian ini dapat dilakukan secara individu atau melalui kelompok masyarakat. Dalam hal ini, orang yang bekerja harus mencoba menemukan masalah dan sumber daya klien. Oleh karena itu, program tersebut mencapai tujuan yang tepat. Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemberdayaan berhasil, tahap pengkajian sama pentingnya dengan tahap persiapan.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini, petugas bertindak sebagai "agen pertukaran" dan mencoba melibatkan warga dalam diskusi tentang masalah yang mereka hadapi dan potensi solusi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai program dan inisiatif alternatif. Setiap program harus menjelaskan keuntungan dan kerugiannya agar program tersebut dapat menunjukkan kegiatan



atau program yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemberdayaan.

#### 4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada titik ini, agen perubahan membantu setiap kelompok dalam mengembangkan dan menetapkan rencana tindakan. Petugas juga membantu menyusun ide-ide, terutama membuat proposal untuk penyandang dana. Oleh karena itu, pemberi dana harus memahami tujuan dan tujuan dari proyek yang akan dilaksanakan.

#### 5) Tahap “Implementasi” Program atau Kegiatan

Peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat memastikan bahwa program pemberdayaan bertahan. Karena hal-hal yang sudah direncanakan dengan baik terkadang menjadi kacau, hubungan antara pengelola dan masyarakat menjadi penting. Saat ini, program harus direncanakan terlebih dahulu agar pelaksanaannya lancar dan semua orang tahu maksud, tujuan dan sasarannya.

#### 6) Tahap Evaluasi

Proses evaluasi harus melibatkan partisipasi warga untuk memantau dan mengubah program yang sedang berlangsung. Dengan partisipasi warga, diharapkan dalam jangka pendek akan ada sistem pengendalian intern lokal. Akhir sekali, mereka dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk berkomunikasi secara mandiri dengan orang lain. Diharapkan evaluasi ini akan mengukur keberhasilan

program dan mengidentifikasi hambatan untuk mengatasi masalah atau kendala di masa depan.

#### 7) Tahap Terminasi

Langkah terminasi adalah langkah mengakhiri hubungan dengan masyarakat. Pada titik ini, diharapkan program akan segera berakhir. Artinya, orang yang berdaya dapat menata dirinya menjadi lebih baik dengan mengubah keadaan masa lalu yang tidak dapat menjamin kehidupan dirinya dan keluarganya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari tahap persiapan, di mana petugas pemberdayaan dan lapangan disiapkan, tahap pengkajian yang dilakukan secara individu oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap pemformalisasi rencana aksi, tahap "Implementasi" program atau kegiatan, tahap evaluasi dari warga dan petugas pemberdayaan, dan tahap penutup, di mana masyarakat yang diberdayakan.

### **A.5 Indikator Pemberdayaan**

Indikator pemberdayaan masyarakat menunjukkan tingkat keberdayaan sebagai hasil dari program pemberdayaan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Wasistiono menyatakan empat kriteria pemberdayaan masyarakat (2005 : 86) yaitu:

- 1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power within*),
- 2) Kemampuan untuk memperoleh akses (*power to*),

- 3) Kemampuan untuk menghadapi hambatan (*power over*), dan
- 4) Kemampuan untuk membangun kerja sama dan solidaritas (*power with*).

Parameter kekuatan dalam secara konseptual disusun secara bertahap; parameter ini adalah yang tertinggi dari tiga parameter lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat berpendapat bahwa program pemberdayaan masyarakat baru hanya dapat berhasil jika mereka dapat memanfaatkan kekuatan dengan kelompok sasaran mereka. Namun, parameter lain, termasuk tingkatannya yang lebih rendah, dianggap sebagai titik awal untuk mewujudkan kekuatan. (Wasistiono, 2005: 86)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator pemberdayaan adalah masyarakat sudah memiliki kesadaran dan keinginan untuk berubah, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan akses dan menghadapi hambatan dengan tingkat kemampuan untuk bekerja sama dan bersatu.

## **B. Ekonomi Masyarakat**

### **B.1 Pengertian Ekonomi Masyarakat**

Ekonomi adalah istilah yang mengacu pada aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, ekonomi adalah bidang yang mencakup studi tentang prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan. Ini serupa dengan bidang keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Ismail (2009): 93. Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan orang yang memiliki tatanan kehidupan,

standar dan kebiasaan yang dialami di lingkungannya (Arifin, 1997: 94). Sesuai dengan falsafah negara kita, sistem ekonomi yang disebut "ekonomi kerakyatan" harus dibangun dengan fokus pada rakyat dan terdiri dari dua komponen: ekonomi keadilan dan demokrasi. (Zulkarnain, 2003: 124)

Ada dua cara untuk memahami ekonomi rakyat. Yang pertama melihat kegiatan ekonomi pelaku usaha kecil, yang disebut "perekonomian rakyat". Dalam cara ini, pemberdayaan pelaku usaha kecil adalah tujuan dari pemberdayaan ekonomi rakyat. Cara kedua melihat sistem ekonomi—demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan demokratis—yang disebut pembangunan partisipatif. Dalam pendekatan ini, pemberdayaan pelaku usaha kecil adalah tujuan dari pembangunan ekonomi rakyat. Ini menunjukkan bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang tidak hanya menggerakkan pembangunan di satu tingkat, tetapi juga mencakup semua lapisan masyarakat dan proses pembangunan. Metode kedua adalah ekonomi kerakyatan. (Fachri, 2002: 77)

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah pertumbuhan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dan berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan aspek keadilan dan demokrasi ekonomi.

## **B.2 Bentuk-bentuk Ekonomi Masyarakat**

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup yang sangat berbeda-beda, termasuk makanan, pakaian, pekerjaan, bahan bakar, elektronik, perumahan dan lainnya. Hampir semua hal yang dilakukan setiap orang terkait dengan ekonomi, mulai dari makan pagi, berangkat kerja atau sekolah, membeli makan siang, berbelanja, hingga menjual barang lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Ekonomi berjalan karena bisnis.

Kegiatan ekonomi adalah semua tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat membuat semua yang dibutuhkannya dan hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari (Fachri, 2002: 78). Orang-orang selalu membutuhkan orang lain dalam aktivitas ekonomi. Akibatnya, kerja sama individu sangat penting untuk membantu satu sama lain. Dengan bekerja membajak sawah mereka dan membeli beras untuk dijual atau dimakan sendiri, petani terlibat dalam kegiatan ekonomi ini. Selain itu, mereka menghasilkan makanan, membuat pakaian dan berbagai jenis produksi lainnya.

Ketika semua orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ekonomi akan terus bergerak seperti roda. Oleh karena itu, Fachri (2002 : 79) membagi ekonomi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

- 1) Kegiatan konsumsi

Dalam ekonomi, konsumsi didefinisikan sebagai tindakan individu yang menggunakan produk dan layanan yang dibuat oleh

produsen. Semua konsumen memiliki kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk lingkungan, tingkat pendidikan, gaya hidup dan faktor lain. Program Konsumsi bertujuan untuk secara bertahap mengurangi nilai barang atau jasa; ini dilakukan dengan menggunakan nilai produk untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Meskipun produsen juga seorang pedagang, seorang pedagang tidak dapat dipisahkan dari produsen.

## 2) Kegiatan distribusi

Distribusi adalah tindakan ekonomi berikutnya. Menyalurkan barang atau jasa yang dibuat oleh produsen kepada pelanggan disebut distribusi. Distributor adalah nama orang yang biasa melakukan distribusi. Distributor melakukan fungsi distribusi yang sangat berbeda, seperti membeli, menyimpan, dan memindahkan barang. Namun, setiap tindakan distribusi biasanya memiliki tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan pelanggan, menghasilkan keuntungan dari barang atau jasa tersebut, dan memastikan bahwa bisnis berjalan dengan baik. Fungsi distribusi, seperti halnya produksi, dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pemasaran, produk, perusahaan, dan perilaku pembelian.

## 3) Kegiatan produksi

Tingkat produksi adalah komponen penting dari setiap kegiatan ekonomi. Dalam kasus ini, organisasi kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dikenal sebagai produksi. Untuk memastikan bahwa

produk dan layanan ini memenuhi kebutuhan konsumen, pekerjaan produksi melibatkan pihak yang disebut produsen. Selain itu, produksi membutuhkan laba atau keuntungan untuk melanjutkan usaha, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, dan tujuan lainnya. Banyak faktor, termasuk modal, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan sumber daya manusia, memengaruhi setiap operasi manufaktur.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi, distribusi, dan produksi adalah semua bentuk ekonomi masyarakat. Sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan adalah komponen yang memengaruhi kegiatan produksi.

### **B.3 Indikator Ekonomi Masyarakat**

Untuk mengukur kemajuan pembangunan, diperlukan indikator atau ukuran. Indikator dan variabel mungkin berbeda untuk setiap negara. Di negara-negara yang masih miskin, kemajuan dan pembangunan mungkin masih bergantung pada kebutuhan dasar seperti pasokan listrik ke desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, indikator pembangunan akan berfokus pada faktor sekunder dan tersier di negara-negara yang telah memenuhi kebutuhan ini. Institusi internasional menggunakan indikator ekonomi seperti tabungan, struktur ekonomi, urbanisasi, pendapatan perkapita (GNP atau PDB) (Tikson, 2005:

98). Ringkasan tentang indikator tersebut oleh Tikson (2005) akan disajikan berikut ini:

1) Pendapatan perkapita

Salah satu indikator ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan per kapita, baik dari segi GNP maupun PDB. Indikator ini merupakan bagian dari kesejahteraan manusia yang dapat diukur dari perspektif ekonomi makro, dan dengan demikian dapat menjelaskan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pendapatan per kapita memiliki banyak kelemahan, tampaknya telah menjadi indikator penting dari perekonomian. Akibatnya, negara-negara dunia ketiga memanfaatkan peningkatan pendapatan nasional untuk membangun. Ada anggapan bahwa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara otomatis menghasilkan peningkatan pendapatan nasional, atau pertumbuhan ekonomi.

Menurut beberapa ahli, sistem distribusi pendapatan nasional tidak diperhitungkan saat menggunakan indikator ini. Indikator ini tidak menghitung distribusi pendapatan dan kesejahteraan, atau pemerataan akses ekonomi.

2) Struktur ekonomi

Menurut asumsi, peningkatan pendapatan perkapita akan menunjukkan perubahan struktural dalam sistem ekonomi dan sosial.



Dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita, kontribusi industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan terus meningkat, dan peningkatan sektor industri dan tingkat upah akan memicu peningkatan investasi dan perluasan tenaga kerja.

### 3) Urbanisasi

Semakin banyak orang yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan disebut urbanisasi. Disebutkan bahwa kawasan perkotaan tidak ada jika pertumbuhan penduduknya sama dengan nol. Dibandingkan dengan pengalaman industrialisasi di Amerika Utara dan Eropa Barat, jumlah orang yang tinggal di kota berbanding lurus dengan industrialisasi. Artinya, bergantung pada proses produksi, laju urbanisasi akan meningkat. Mayoritas orang tinggal di perkotaan di negara maju, tetapi mayoritas orang tinggal di pedesaan di negara berkembang. Dengan demikian, pedesaan dianggap sebagai indikator pembangunan.

### 4) Angka Tabungan

Uang memainkan peran penting dalam proses industri masyarakat, seperti yang terlihat di Inggris Raya dan Eropa pada awal munculnya kapitalisme dan diikuti oleh revolusi industri. Modal usaha ini akan dikumpulkan melalui tabungan swasta dan pemerintah di negara yang sangat produktif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator ekonomi dapat berbeda-beda untuk setiap Negara. Misalnya, di negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin bergantung pada kebutuhan dasar, begitupun sebaliknya. Pendapatan perkapita, struktur ekonomi, urbanisasi, dan angka tabungan adalah indikator ekonomi masyarakat.

## **C. Kesejahteraan**

### **C.1 Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai keselamatan, keamanan dan kemakmuran. Sebaliknya, kesejahteraan adalah ketika seseorang merasa sejahtera dalam hidupnya. Meskipun demikian, menyebut "kehidupan yang kaya" atau "masyarakat" akan mendekati pengertian ini dengan perasaan orang-orang yang hidup dalam masyarakat tersebut. Tidak adanya rasa takut, tekanan, kemiskinan, dan berbagai bentuk energi menyebabkan perasaan kesejahteraan. Jika ada cukup barang, jasa, dan peluang di masyarakat, efeknya akan lebih besar (Departemen Pendidikan Nasional 2005).

Kesejahteraan pada dasarnya menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan aspek negatif dari kesejahteraan adalah kesedihan (tragedi) kehidupan. Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan yang memadai adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan sekunder meliputi ketersediaan sarana transportasi (sepeda, mobil, bus, dll.),

informasi dan komunikasi (radio, televisi, telepon, handphone, internet, dll.). Sebagai tempat rekreasi dan hiburan, fungsinya sangat penting. Semua kebutuhan yang disebutkan di atas bersifat material, dan karenanya kesejahteraan yang diciptakan juga bersifat material. (Sarhini, 2004: 86)

Masyarakat miskin umumnya tidak merasakan kesejahteraan ini, karena pendapatan hariannya yang rendah, sehingga tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Keluarga miskin akan sering menggunakan pendapatan mereka untuk membeli makanan dan tempat tinggal untuk kebutuhan dasar mereka. (Samuelson & William, 2004: 104)

Masyarakat di seluruh dunia mengharapkan kesejahteraan. Tidak hanya sulit untuk memahami konsep kesejahteraan yang sebenarnya, tetapi juga sulit untuk mengejanya. Menurutnya, karena pertimbangan nilai tidak dapat diukur, kebutuhan spiritual biasanya diabaikan dalam ilmu ekonomi nonklasik. Memenuhi kebutuhan material sebenarnya sama pentingnya dengan mencapai kesejahteraan, kemuliaan moral, kesejahteraan sosial ekonomi, kedamaian mental, kebahagiaan dalam rumah tangga dan masyarakat, dan hilangnya kriminalitas. (Chapra, 2008: 106)

Islam mengajarkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak terbatas pada kehidupan duniawi, karena Allah SWT meminta umat Islam untuk mempelajari alam dan mengeksplorasi sumber dayanya untuk membantu pertumbuhan umat manusia. Islam sangat menekankan upaya spiritual dan material dan

menciptakan keharmonisan lahir dan batin individu dan kelompok. Oleh karena itu, Islam mendukung aspek spiritual dan material kehidupan manusia sebagai sumber kekuatan bersama dan menjadikannya pilar kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Islam juga menganggap bahwa meningkatkan spiritualitas manusia sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia. (Shihab, 1996: 68)

Al-Qur'an menjelaskan kesejahteraan sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa sebelum mereka turun ke bumi. Sebagai hasil dari pengabdian Adam dan Hawa kepada surga, diharapkan gambar surga muncul di dunia dan hidup di masa depan. Masyarakat yang menghasilkan bayang-bayang surga memiliki kesejahteraan (Shihab, 1996: 69). Kesejahteraan surgawi ini tertulis dalam firman Allah SWT QS. Thaha : 117-119, yang Artinya : *"Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"*.

Menurut ayat ini, semua makanan, pakaian, dan papan tersedia di sana karena mereka tidak lapar, tidak dahaga, telanjang, dan kepanasan oleh matahari. Namun, kebalikannya adalah kehidupan yang sempit, tidak tenang, selalu tidak puas, dan gelisah di dadanya. Ini terjadi meskipun pada awalnya dia terlihat sangat mewah, lengkap dengan pakaian dan tempat

tinggal. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan bagian penting dari kesejahteraan sosial. (Bahreisy, 1988: 76)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa hidupnya sejahtera, yaitu terbebas dari ketakutan, tekanan, kemiskinan, dan merasa berkecukupan. Dalam perspektif Islam, terpenuhinya kebutuhan pokok adalah unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial, sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia.

## **C.2 Bentuk-bentuk Kesejahteraan**

Manusia adalah makhluk sosial, dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan atau bantuan dari orang lain atau kelompok. Setiap manusia bahkan ketika sedang berada dalam rahim seorang ibu pun membutuhkan bantuan dari ibunya untuk mendapatkan makanan berupa asupan nutrisi dan gizi yang baik agar ketika lahir ke dunia dalam keadaan sehat. Selanjutnya ketika lahir sampai menjalani kehidupan, seorang manusia tidak luput atau tidak lepas dari pertolongan atau bantuan. (Samuelson & William, 2004: 74)

Oleh karena itu, setiap manusia untuk melanjutkan kehidupannya untuk hidup yang baik, langsung atau jelas dan sadar atau tidak sadar, sangat membutuhkan bantuan atau bantuan dari individu dan kelompok. Untuk mempertahankan atau mengikuti kehidupan yang baik, setiap orang memerlukan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam banyak jenis kebutuhan manusia, tidak mungkin individu atau kelompok manusia mengatur dirinya sendiri secara individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, peran negara sangat penting sebagai organisasi besar yang menguasai penduduk suatu daerah. Suatu negara harus mampu menata wilayahnya agar setiap orang yang berada di wilayahnya dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Negara memiliki semua sumber daya alam dan manusia yang harus digunakan dan ditingkatkan serta didistribusikan kepada masyarakat di negara tersebut, sehingga distribusi sumber daya alam dan manusia inilah yang sering kita sebut dengan “pelayanan publik”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *“pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas produk, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”*. Berdasarkan pengertian tersebut, sebenarnya pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda, Negara harus hadir dan mampu mendistribusikan pelayanan publik yang tepat sasaran dan efisien. (hafid, 2022: 103)

Harus kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan faktor utama yang membuat kesejahteraan masyarakat menjadi baik, berapa banyak program pemerintah dari organisasi yang bergantung padanya dilaksanakan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab di bidang jaminan sosial, bantuan kemanusiaan, jaminan sosial dan pengelolaan orang miskin. Selain itu, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terdapat institusi kesehatan yang berperan dalam bidang kesehatan dengan berbagai program penting untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat yang baik dan layak. Ada lagi instansi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek yang memiliki tanggung jawab mencari pendidikan yang baik dan mampu mendistribusikan pendidikan secara individual dan permanen.

Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membantu satu sama lain. Kesejahteraan adalah jenis pelayanan publik seperti lembaga sosial yang memberikan jaminan, pemberdayaan dan perlindungan sosial, lembaga kepolisian yang menjaga keamanan dan ketertiban, dan lembaga kesehatan yang memberikan tingkat kesehatan yang lebih baik dan layak.

### **C.3 Indikator Kesejahteraan**

Menurut Hafidz, faktor internal, eksternal, dan manajemen keluarga sangat memengaruhi kesejahteraan keluarga (2022 : 89), meliputi:

- 1) Penghasilan

- 2) Pendidikan
- 3) Pekerjaan
- 4) Jumlah anggota keluarga
- 5) Umur

Kesejahteraan dipengaruhi oleh faktor eksternal, diantaranya:

- 1) Aksesibilitas *financial* pada lembaga keuangan
- 2) Akses bantuan pemerintah
- 3) Aksesibilitas dalam kredit barang/peralatan
- 4) Lokasi tempat tinggal

Unsur manajemen keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah:

- 1) Perencanaan
- 2) Pembagian tugas
- 3) Pengontrolan kegiatan

Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal sendiri meliputi penghasilan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan. Selain itu faktor eksternal yaitu kemudahan aksesibilitas *financial* pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, aksesibilitas dalam kredit barang dan lokasi tempat tinggal. Unsur-unsur keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi perencanaan, pembagian tugas dan pengontrolan kegiatan.